

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari paparan data di bab sebelumnya bahwa peran BUMDES Gogodeso telah mencapai peran yang penting bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun peran BUMDES Gogodeso dapat mensejahterkan perekonomian masyarakat Desa Gogodeso.

A. Pembahasan tentang Peranan BUMDES dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Desa Gogodeso merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah petani dan peternak, dengan usaha masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dengan kerja keras maupun berwirausaha mampu menjadikan perekonomian di Desa Gogodeso menjadi lebih mandiri dan berdaya. Sehingga tingkat perekonomian masyarakat di Desa Gogodeso lebih baik. Hal ini terjadi karena selain dari kegigihan masyarakatnya sendiri, juga karena adanya pendampingan secara langsung dari BUMDes Sejahtera Abadi. Maka sudah jelas bahwa dengan berdirinya BUMDes ini sangat berperan bagi masyarakat, terutama dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Peranan, BUMdes Sejahtera Abadi lebih berperan dalam pendampingan bagi masyarakat. Selain itu dengan adanya unit-unit usaha juga membantu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Gogodeso. Jadi peran BUMDes Sejahtera Abadi dalam perekonomian masyarakat

yaitu: Pendamping Permodalan, sesuai dengan unit simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes Sejahtera Abadi pendampingan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, dengan begitu masyarakat tersebut akan terbantu dalam permodalan untuk memulai suatu usaha.

Pendampingan berikutnya adalah pendampingan pelatihan. Dalam pendampingan pelatihan ini bertujuan untuk mencari potensi-potensi yang dimiliki masyarakat, selain itu juga mencari masyarakat yang berkeinginan untuk berwirausaha. Jadi BUMDes Sejahtera Abadi bersama dengan Pemerintah Desa bersepakat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Kemudian ketiga, terdapat pendampingan pengembangan. Pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, selain itu juga mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat, bersama maju bersama BUMDes untuk perekonomian yang lebih mapan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Seyadi tentang peranan penting BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. Menurut Seyadi terdapat beberapa peranan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain yaitu membangun dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, secara aktif berperand dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh

perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.¹⁰⁰

BUMDes juga hendaknya berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Langkah BUMDes merupakan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang tercantum dalam perundang-undangan. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan peran akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian suatu desa. Sebagaimana Empat tujuan utama pendirian BUMDes yang diungkapkan Kamaroesid adalah:¹⁰¹

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Di samping itu dari segi fungsi dari eksistensi BUMDes, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha ini merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat

¹⁰⁰ Seyadi, *BUMDes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta: UPP STMYKPN, 2003), h. 16

¹⁰¹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), h.13.

berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa.¹⁰²

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tataa turan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.¹⁰³

Penelitian serupa dilakukan oleh Egidius dengan judul "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat. Hasil penelitian tersebut ditulis dalam jurnal Poros Politik yang terbit belum lama ini pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe sangat membantu masyarakat Desa Subun Bestobe terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi harga dan waktu dalam memenuhi kebutuhan sembako. Masyarakat

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

tidak perlu membuang-buang waktu dan mengeluarkan biaya transportasi karena sembako sudah tersedia di Desa Subun Bestobe.¹⁰⁴

Kemudian BUMDes juga membeli seluruh hasil bumi dari masyarakat yang berupa jagung, kacang-kacangan, asam, ubi dan kemiri. Selama ini, kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat desa Subun Bestobe adalah ketiadaan pasar atau tempat untuk menjual hasil bumi mereka. Potensi hasil bumi seperti jagung, kemiri dan asam sangat besar. BUMDes Tulus menyediakan penyewaan tenda dan peti jenazah dengan harga yang relative murah. Usaha simpan pinjam juga dilakukan oleh BUMDes Tulus. Meskipun hal ini belum berjalan secara maksimal namun sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat bisa menyimpan dan meminjam uang di BUMDes Tulus. Pinjaman diberikan dengan plafon Rp. 1.000.000 dan diangsur selama 10 kali dengan bunga 3 %. Hal ini sangat membantu karena selama ini beredar banyak pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi yakni 10-20 %.¹⁰⁵

B. Kendala yang Dihadapi BUMDES dalam Pemberdayaan Perekonomian di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Setiap usaha yang berjalan untuk mencapai suatu tujuan pasti ada masalah yang dihadapi, tidak ada usaha yang berjalan tanpa hambatan. BUMDes Sejahtera Abadi sering kali menghadapi kendala dalam

¹⁰⁴Egidius Fkun, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat" dalam *Jurnal Poros Politik* 1.1 (2019): h. 10-13

¹⁰⁵*Ibid.*

pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kendala tersebut baik kendala internal maupun eksternal.

Kendala Internal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain adalah minimnya modal unit simpan pinjam. BUMDes Sejahtera Abadi berperan dalam pendampingan modal, dengan minimnya modal dalam unit simpan pinjam akan menghambat dalam upaya pendampingan tersebut, hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang meminjam dana untuk mendirikan suatu usaha maupun mengembangkan suatu usaha dengan nominal besar sejumlah 20 juta, hal tersebut akan berdampak pada masyarakat yang lainnya, karena masyarakat yang ingin meminjam dana harus menunggu lagi.

Kemudian kendala internal berikutnya adalah tingginya Persaingan Pasar. Dengan adanya BUMDes selain bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, juga bertujuan untuk memasarkan produk masyarakat agar lebih dikenal oleh semua kalangan. Yang menjadi kendala dalam pemasaran ini kurangnya jaringan bisnis. Dengan hal tersebut menghambat dalam proses pemasaran hasil produksi masyarakat yang masih baru.

Sedangkan kendala Eksternal yang terjadi pada masyarakat di Desa Gogodeso sendiri, ada beberapa yang memiliki pengetahuan kurang terhadap BUMDes, mereka cenderung tidak mau tau, menyepelekan keberadaan ataupun bekerjasama dengan BUMDes, mereka takut bahwa nantinya hanya akan dimanfaatkan oleh BUMDes untuk keberhasilannya sendiri.

Penelitian serupa dilakukan oleh Egidius sebagaimana yang telah disebutkan pada fokus pembahasan pertama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tantangan atau kendala yang dihadapi oleh BUMDes Tulus yakni terkait akuntabilitas, infrastruktur dan sumber daya manusia. Kendala yang dihadapi oleh BUMDes adalah tiadanya penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena pengurus BUMDes Tulus belum memberikan laporan pertanggung jawaban tahun 2018 kepada pemangku kepentingan yakni kepala desadan Badan Permusyawaratan Desa. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan karena akan menjadi sumber penghambat pengelolaan BUMDes Tulus.¹⁰⁶

Kendala berikutnya adalah BUMDes tersebut belum memiliki kantor sendiri. Lokasi BUMDes Tulus berada di rumah bendahara. Kondisi ini tentu membuat pelayanan menjadi tidak maksimal. Kemudian permasalahan terakhir yang dihadapi oleh BUMDes Tulus adalah adanya pekerjaan tetap dari para pengurus sehingga menjadikan BUMDes sebagai usaha tambahan bahkan sampingan. Akibatnya BUMDes tidak terkelola dengan maksimal. Serta terdapat banyak masyarakat yang rajin meminjam namun pura-pura lupa membayar bon.¹⁰⁷

Kendala lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Latifatul Imama, Yaqub Cikusin, dan Khoiron dalam penelitiannya yang berjudul "Patologi Birokrasi (Studi Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha

¹⁰⁶Egidius Fkun, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat." *Jurnal Poros Politik* 1.1 (2019): h. 15-16

¹⁰⁷*Ibid.*

Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). "Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes pada Desa Wonorejo masih terdapat problem dalam pengelolaannya yaitu:(1) Kurangnya dana desa untuk kemajuan BUMDes dan juga belum adanya potensi wisata desa yang dapat dikembangkan.(2) keorganisasian BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum ada kerjasama atau hubungan baik dengan Kepala Desa dan BPD dan juga dalam BUMDes SDM-nya masih minim dan membutuhkan untuk perekrutan anggota baru. (3) fasilitas BUMDes pada Desa Wonorejo yaitu masih belum adanya gedung/kantor untuk bekerja para karyawan. (4) persepsi masyarakat mengenai problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan BUMDes, dan juga dalam pencairan dan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) masih terdapat keterlambatan, serta pada BUMDes tersebut belum adanya sistem upah untuk para karyawan yang mengakibatkan terdapat dua anggota BUMDes yang mengundurkan diri.¹⁰⁸

C. Strategi yang Dilakukan dalam Menghadapi Kendala yang Mengganggu Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Strategi dalam penyelesaian suatu kendala yang hanya menghambat proses pemberdayaan memanglah perlu, disini BUMDes Sejahtera Abadi

¹⁰⁸Siti Latifatul Imama, Yaqub Cikusin, and Khoiron. "PATOLOGI BIROKRASI (Studi Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" dalam *Jurnal Respon Publik* 13.6 (2019): 60.

memiliki strategi dalam penyelesaian kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi permodalan yang minim di unit simpan pinjam maka strategi yang dilakukan oleh BUMDes yaitu dengan menetapkan nominal maksimal pinjaman dana, serta teguran kepada masyarakat yang telat dalam pengangsuran pinjaman.

Kemudian dalam proses pemasrannya BUMDes Sejahtera Abadi masih dalam ruang lingkup desa saja, terdapat kendala eksternal yang antara lain mengingat masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami secara penuh tentang peranan BUMDes dalam masyarakat yang sebenarnya, maka BUMDes bersama dengan pemerintah Desa berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan cara tersebut diharapkan masyarakat akan mengerti tentang pentingnya keberadaan BUMDes Sejahtera Abadi.

Strategi ini dilaksanakan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Hal ini penting untuk dikolaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: *pertama*, Kooperatif yakni semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. *Kedua*, Partisipatif, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Prinsip *ketiga* adalah Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Prinsip *keempat* adalah Transparan. Yakni aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. *kelima*, Akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. *Keenam* yang merupakan prinsip terakhir yakni Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Selain itu dalam penyelenggaraan penanggulangan kendala yang dihadapi, BUMDes memiliki karakteristik khusus sebagaimana yang dijelaskan oleh Dewi dalam uraian berikut. Karakteristik ini yang menjadi ciri khas yang membedakan BUMDes dengan badan usaha lainnya. Tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: (1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. (2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil). (3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom). (4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. (5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy) (6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.

Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD,dan Anggota).¹⁰⁹

¹⁰⁹Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014, h. 136